

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2019)

Oleh :

Eka Pradana Mahardika,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Fauzan ,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Muhammadiyah

Email : b200180364@student.ums.ac.id

.Article Info

Article History :

Received 16 July - 2022

Accepted 25 July - 2022

Available Online

31 July - 2022

Abstract

This study has a purpose, namely to determine the effect of Regional Original Income, General Allocation Funds, and Capital Expenditures on the Level of Regional Financial Independence. The population in this study is PAD, DAU, Capital Expenditure and the Level of Regional Financial Independence in the Regency/City of Central Java Province in 2017-2019. The samples used in this study were 82 samples. The sampling method used purposive sampling technique. The statistical method uses multiple linear regression analysis model. The results of this study indicate that PAD and DAU have an effect on TKKD, while and DBH have no effect on TKKD.

Keyword :

Regional Original Income (PAD) ,General Allocation Fund (DAU), Capital Expenditure (BM), Regional Financial Independence (TKKD)

1. PENDAHULUAN

Reformasi yang terjadi di Indonesia dalam berbagai bidang membawa banyak perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan, serta ekonomi yang menyebabkan timbulnya berbagai tuntutan terhadap pemerintah untuk pengelolaan yang lebih baik. Salah satu agenda reformasi yaitu dengan adanya otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Di era reformasi seperti saat ini masyarakat sangat menghendaki agar pemerintah melakukan pengelolaan yang lebih baik. Kondisi tersebut akhirnya mendorong pemerintah membentuk UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 untuk mengatur pemberian otonomi daerah sebagai bentuk perubahan amandemen Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadi bentuk perubahan positif dari krisis yang dialami pada tahun 1997-1998 akibat penerapan sistem ekonomi sentralistik yang mengakibatkan ekonomi daerah sangat bergantung pada pusat. Otonomi

daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2001 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004, menghendaki suatu daerah untuk berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Sesuai asas *money follows function*, penyerahan kewenangan daerah juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dimaksudkan agar Daerah menjadi mampu

untuk melaksanakan segala urusan pemerintahannya sendiri karena sumber-sumber pembiayaan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah.

Kemandirian keuangan daerah merupakan gambaran pemerintah daerah dalam hal ketergantungan daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat dan propinsi. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah dan propinsi semakin rendah. Kemandirian keuangan daerah ini merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Diadakannya otonomi daerah diharapkan suatu daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Begitu pula dengan keuangan daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul Halim 2004). Jika pendapatan asli daerah lebih besar dari dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri. Dengan PAD yang dihasilkan, daerah tersebut dapat membiayai kebutuhan daerahnya sendiri sehingga dapat menekan anggaran yang diberikan oleh pemerintah contohnya dana alokasi umum (DAU).

Dana Alokasi Umum yaitu Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Nordiawan 2017). DAU digunakan untuk mengalokasikan belanja daerah, baik belanja modal semacam belanja tanah, bangunan, serta asset tetap yang lain juga belanja operasional misalnya belanja pegawai, belanja barang dan lain sebagainya. Hubungan antara DAU dengan kemandirian daerah yakni berbanding terbalik. Jika dana alokasi umum tinggi maka tingkat kemandirian keuangan suatu daerah rendah.

Bagi PP No 71/2010, belanja modal mengacu pada pengeluaran rumah tangga untuk pembelian asset tetap serta asset yang lain yang bisa menciptakan keuntungan selama lebih dari satu tahun. Belanja modal menjadi salah satu ukuran perencanaan yang baik dengan melihat alokasi APBD yang diberikan untuk perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Belanja modal yang besar diharapkan dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sudah seharusnya pemerintah daerah lebih memaksimalkan potensi yang ada pada daerahnya hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi yang diberikan oleh pemerintah.

Dari data APBD tahun 2018, perbandingan belanja modal terhadap total belanja daerah masih berada dibawah belanja modal rata-rata nasional 19,4%. Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2018 dialokasikan untuk belanja modal sebesar 7,5% dari total belanja daerah. Alokasi belanja modal ini jauh dari ketentuan Peraturan Presiden No. 5/2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014 yang mengamanatkan bahwa alokasi belanja modal harus memenuhi sekurang-kurangnya 30% dari total belanja daerah sementara itu alokasi untuk belanja pegawai Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan sebesar 27,2%. Masyarakat mengharapkan anggaran yang digunakan untuk belanja modal harusnya lebih besar namun pada kenyataannya anggaran yang lebih besar digunakan pada belanja pegawai berbentuk gaji serta tunjangan. Jika belanja modal rendah maka pembangunan serta perbaikan wilayah akan semakin kecil (Darwis, 2015). Belanja pegawai ialah segala bentuk pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk mendanai kompensasi yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk uang dan komoditas yang tersedia untuk pegawai negeri.

Dari penjabaran latar belakang diatas, menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi terdapat perbedaan antara teori dan fakta hal ini mendukung peneliti agar melakukan riset yang serupa dengan judul.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Stewardship Theory

Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, dimana

para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, dan berusaha mencapai sasaran organisasinya (Donaldson dan Davis, 1989). Stewardship theory sering disebut sebagai teori pengelolaan atau penatalayanan yang menggambarkan hubungan yang kuat antara kesuksesan dan kepuasan organisasi (Ernawati & Riharjo, 2017). Stewardship theory merupakan teori yang dibangun berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain (Said, 2015). Bagi penelitian ini, teori stewardship melibatkan kehadiran pemerintah daerah sebagai lembaga yang bisa dipercaya untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kepentingan publik sehingga pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara maksimal, seperti tujuan organisasi sektor publik sendiri memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah daerah yang bertindak sebagai steward, maka rakyat selaku principal akan merasa puas dengan kinerja Pemerintah.

2. Signalling Theory

Teori signalling dikembangkan sebagai upaya untuk memberikan sinyal informasi dari pihak yang lebih memiliki informasi kepada pihak stakeholder yang kurang memiliki informasi di perusahaan [8]. Teori signalling pada sektor publik ditujukan pada upaya pemerintah memberikan sinyal dalam bentuk informasi keuangan yang berkualitas yang implementasinya dirasakan oleh masyarakat dari pelayanan publik yang telah disediakan pemerintah. Kemandirian keuangan daerah perlu untuk diinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kemampuan daerah dalam mengelola ketersediaan sumber daya daerah. Keterkaitan teori signalling terhadap penelitian ini adalah menjelaskan pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan memberikan sinyal informasi keuangan daerah yang secara optimal dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan Hipotesis

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dalam bentuk satuan moneter yang diterima oleh pemerintah daerah dari sumber-

sumber yang diusahakan sendiri oleh pemerintah daerah yang bersangkutan (Pratolo dkk, 2016). Artinya Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengelola sumberdaya yang dimiliki secara maksimal guna memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Neneng (2018) dan Siska Silitonga (2020) menunjukkan variabel pendapatan asli daerah memiliki arah koefisien positif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam mengurangi terjadinya ketimpangan daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah dengan mempertimbangkan prinsip keadilan.

Ahmad Chabibillah (2019), telah melakukan penelitian terhadap dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian daerah, hasil penelitian menunjuka dana alokasi umum berpengaruh signifikan dan memiliki arah koefisien positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (Halim & Kusufi, 2012). Pemerintah daerah sebagai (steward) diharuskan untuk mengelola belanja modal dengan baik dan tepat agar masyarakat mendapatkan pelayanan secara maksimal. Pengelolaan belanja modal yang maksimal membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah (steward) dengan masyarakat agar memberikan kepuasan bagi publik serta dapat mendukung terciptanya

kemandirian keuangan daerah. Pemerintah daerah (steward) berkewajiban mengelola belanja modal sesuai dengan kepentingan pemilik atau rakyat, serta lebih mengedepankan kerja sama guna mencapai tujuan organisasi.

Penelitian yang dilakukan Kurnia (2016) dan Ema Indah Nur Fitriyani menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan dan memiliki arah koefisien positif terhadap tingkat kemandirian daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah.

3. METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kausatif, Penelitian kausatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen (Sugiyono, 2005). Penelitian kausatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan beberapa variabel lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu menjelaskan hubungan antar variabel menggunakan angka-angka sebagai indikator variabel penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian.

B. Metode, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi dan sampel pada penelitian ini menggunakan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Penentuan sampel ditetapkan dengan teknik total sampling, yakni seluruh populasi yang ada dijadikan sebagai sampel. Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 35 kabupaten/kota, yang berarti sampel yang digunakan juga sebanyak 35 kabupaten/kota. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan karakteristik sebagai berikut:

1. Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 – 2019.
2. Kabupaten dan Kota yang tidak melaporkan realisasi

APBD secara berturut-turut pada tahun 2017 – 2019.

C. Data dan Sumber Data

Jenis data di dalam riset ini ialah data sekunder. Yaitu data yang terkumpul melalui lembaga yang mengumpulkan informasi yang diterbitkan para pengguna jasa (Yulianto & Maskan 2018:37) Data yang dipergunakan pada riset bersumber dari data sekunder berdasarkan Laporan Realisasi APBD pada wilayah pusat atau kota Provinsi Jawa dari periode 2017 hingga 2019 yang didapatkan dalam Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) Provinsi Jawa Tengah ataupun bisa diakses lewat web www.djpk.depkeu.go.id Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan(DJPK).

D. Variabel Penelitian

Variabel dependen (y) dalam penelitian ini adalah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan variabel independen (x) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal.

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen:

1. Variabel independen

a. Pendapatan Asli Daerah Pengukuran PAD

dengan mencari kontribusi terhadap pendapatan daerah yaitu :

$$\frac{\text{PENDAPATAN ASLI DAERAH}}{\text{TOTAL PENDAPATAN DAERAH}} 100\%$$

b. Dana Alokasi Umum. Pengukuran DAU

dengan mencari kontribusi terhadap pendapatan daerah yaitu :

$$\frac{\text{DAU}}{\text{TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH}} 100\%$$

c. Belanja modal

Pengukuran Belanja Modal dengan mencari kontribusi terhadap pendapatan daerah yaitu :

$$\left(\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \right) 100\%$$

2. Variable dependent

a. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian keuangan daerah.

$$\frac{\text{PENDAPATAN ASLI DAERAH}}{\text{TOTAL PENDAPATAN TRANSFER}} 100\%$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi yang diteliti didalam riset merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah. Sampel sejumlah 35 daerah di Provinsi Jawa Tengah termasuk 105 observasi. . Akan tetapi sampel tersebut harus dikurangi sebanyak 23 data yang telah diuji secara statistik sebagai data outliers, sehingga total dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 82 sampel untuk periode 2017-2019.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menjabarkan suatu data yang telah dikumpulkan dengan melihat nilai rata-rata, standar deviasi, minimum dan maksimum. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif variabel dependen dan variabel independen disajikan dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

	PAD	DAU	BM	TKD
N	Valid 82	82	82	82
	Missing 0	0	0	0
Mean	16.4501	45.1426	17.2727	27.1335
Std. Deviation	2.86667	2.29086	3.60398	4.95840
Minimum	12.15	40.07	11.11	19.16
Maximum	24.95	50.76	25.83	38.15

Sumber: Hasil Pengolahan Data Statistik
Dari hasil analisis deskriptif yang disajikan pada table 4.2 diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah disebut juga PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan pada aturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah dan merupakan factor pendukung terlaksananya otonomi daerah

sehingga dapat mempengaruhi tingkat kemandirian suatu daerah. Hasil statistik deskriptif yang disajikan pada table 4.2 bahwa dari 82 data kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2017-2019 memiliki nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 16,45 dengan standar deviasi sebesar 2,87. Serta mempunyai nilai minimum sebesar 12,15 dan nilai maksimum sebesar 24,95. Kabupaten/kota yang memiliki nilai PAD terendah adalah Kabupaten Blora pada tahun 2018 sedangkan kabupaten/kota yang memiliki nilai PAD tertinggi adalah Kota Semarang pada tahun 2019

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai kebutuhan pengeluaran daerahnya dalam pelaksanaan desentralisasi. Hasil statistik deskriptif yang disajikan pada tabel 4.2, bahwa dari 82 data kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2017-2019 memiliki nilai rata-rata Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 45,15 dengan standar deviasi sebesar 2,29. Serta mempunyai nilai minimum sebesar 40,07 dan nilai maksimum sebesar 50,76. Kabupaten/kota yang memiliki nilai DAU terendah adalah Kota Semarang pada tahun 2018 sedangkan kabupaten/kota yang memiliki nilai DAU tertinggi adalah Kota Salatiga pada tahun 2017.

Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan atau satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Hasil statistik deskriptif yang disajikan pada tabel 4.2, bahwa dari 82 data

kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2017-2019 memiliki nilai rata-rata Belanja Modal sebesar 17,28 dengan standar deviasi sebesar 3,61. Serta mempunyai nilai minimum sebesar 11,11 dan nilai maksimum sebesar 25,83. Kabupaten/kota yang memiliki nilai belanja modal terendah adalah Kabupaten Batang pada tahun 2018 sedangkan kabupaten/kota yang memiliki nilai belanja modal tertinggi adalah Kota Semarang pada tahun 2017.

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut mampu untuk membiayai atau mendanai sendiri kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat yang telah membantu menaikkan sumber pendapatan asli daerah dengan membayar pajak dan retribusi daerah. Hasil statistik deskriptif yang disajikan pada tabel 4.2, bahwa dari 82 data kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2017-2019 memiliki nilai rata-rata Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 27,14 dengan standar deviasi sebesar 4,96. Serta mempunyai nilai minimum sebesar 19,16 dan nilai maksimum sebesar 38,15. Artinya tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih rendah. Kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemandirian terendah adalah Kabupaten Blora pada tahun 2018 sedangkan kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemandirian tertinggi adalah Kota Semarang pada tahun 2019.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah dalam model regresi data yang digunakan terdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji CLT (*Central Limit Theorem*) yaitu jika ukuran sampel yang digunakan cukup besar ($n > 30$), maka sampel dapat dikatakan terdistribusi normal (Gujarati, 2015) penelitian ini memiliki

jumlah sampel 82, maka dapat dianggap terdistribusi normal karena jumlah ($n > 30$).

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data terjadi multikolinieritas atau tidak dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF lebih dari 10 dan nilai tolerance kurang dari 0,10 maka dapat diindikasikan terdapat multikolinieritas.

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Kesimpulan
PAD	0,933	1,072	Tidak Terjadi Multikolinearitas
DAU	0,979	1,022	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Belanja Modal	0,953	1,050	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data Statistik
Dapat dilihat dari tabel 4.3 nilai VIF dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 1,072, nilai VIF dari Dana Alokasi Umum (DAU) adalah 1,022, dan nilai VIF dari Belanja Modal adalah 1,050. Nilai VIF dari masing-masing variabel tidak lebih besar dari 10, maka dapat diindikasikan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji spearman's rho.

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Kriteria	Nilai Sig	Kesimpulan
PAD	$> 0,05$	0,622	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
DAU	$> 0,05$	0,067	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Belanja Modal	$> 0,05$	0,554	Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Sumber: Hasil pengolahan data statistik
Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 0,622, nilai signifikansi Dana Alokasi Umum (DAU) adalah 0.067, dan nilai

signifikansi Belanja Modal adalah 0,554. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari setiap variabel > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah suatu model regresi terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode t sebelumnya. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat autokorelasi. Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Run's Test apabila nilai sig melebihi 0,05 maka data tidak mengalami autokorelasi.

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi

Test Valuea	-0.09162
Cases < Test Value	41
Cases >= Test Value	41
Total Cases	82
Number of Runs	48
Z	1.333
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.182
a Median	

Sumber: Hasil pengolahan data statistik
Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai sig pada Run's Test 0,182 menunjukkan bahwa nilai dari Run's test melebihi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

1. Regresi Linier Berganda

Tabel 4.6 Hasil Uji regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.366	3.005		5.113	,000
	PAD	1.073	,053	,984	31.846	,000
	DAU	-.334	,065	-.154	-5.108	,000
	Belanja Modal	-.068	,042	-.050	-1.625	,108

Sumber: Hasil pengolahan data statistik
Hasil model regresi linier berganda dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = 15,366 + 1,073 X_1 + (-0,334 X_2) + (-0,068 X_3) + e$$

Dari hasil persamaan regresi berganda tersebut masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta (a) = 15,366 menunjukkan konstanta bernilai positif, artinya jika nilai variabel independen yakni pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal dan belanja pegawai dianggap tidak ada atau sama dengan 0, maka nilai tingkat kemandirian keuangan daerah sama dengan 15,366.
- Koefisien $X_1 = 1,073$ menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah bernilai positif, artinya setiap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan maka tingkat kemandirian daerah akan meningkat sebesar 1,073.
- Koefisien $X_2 = -0,334$ menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum bernilai negatif, artinya setiap dana alokasi umum mengalami kenaikan akan mengakibatkan penurunan pada tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,334.
- Koefisien $X_3 = -0,068$ menunjukkan bahwa variabel belanja modal bernilai negatif, artinya setiap belanja modal mengalami kenaikan akan mengakibatkan penurunan pada tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,068.

Uji T

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Hasil uji t yang diperoleh dari masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji T

Variabel	t hitung	t tabel	Sig	Keterangan
PAD	31,846	1,991	0,000	H ₁ Diterima
DAU	5,108	1,991	0,000	H ₂ Diterima
Belanja Modal	-1,625	1,991	0,108	H ₃ Diterima

Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen yang ada pada regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen,

hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1852.939	3	617.646	347.838	.000 ^b
	Residual	138.503	78	1.776		
	Total	1991.442	81			

Sumber : Hasil pengolahan data statistik Berdasarkan uji F yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ artinya bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Diketahui nilai F_{hitung} sebesar $347,838 > F_{tabel}$ sebesar 2,482 maka PAD, DAU, Belanja Modal dan Belanja Pegawai secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Koefisien Determinasi (adjusted R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan suatu model regresi dalam menjelaskan variabel-variabelnya. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai adjusted R² pada model summary, nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1.

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	.965 ^a	.930	.928	1.33254

Sumber :Hasil pengolahan data statistik Hasil uji regresi menunjukkan nilai adjusted R² sebesar 0,928 atau 92,8%. Artinya 92,8% tingkat kemandirian keuangan daerah dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal dan belanja pegawai. Sedangkan 7,2% dijelaskan oleh factor lain diluar model regresi.

Pembahasan

1. Pengaruh Pendapat Asli Daerah (PAD) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi PAD sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dengan nilai t_{hitung} sebesar $34,236 > t_{tabel}$ sebesar 1,991 maka Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya dari hasil tersebut pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Kemandirian dalam APBD terkait dengan kemandirian pendapatan asli daerah,sebab semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah, bukan dari bantuan pemerintah pusat/provinsi , maka daerah dapat dikatakan mandiri secara keuangan dan daerah tersebut semakin leluasa mengakomodasikan kepentingan masyarakat tanpa muatan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2019) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Artinya jika PAD pada suatu daerah besar atau lebih tinggi dari dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat/provinsi maka daerah tersebut dapat dikatakan sudah mandiri. Sebaliknya apabila PAD pada suatu daerah lebih kecil dari dana bantuan yang diberikan pemerintah pusat/provinsi maka daerah tersebut dapat dikatakan belum mandiri dari segi finansialnya karena masih bergantung pada dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah baik dari pusat maupun provinsi.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi DAU sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dengan nilai t_{hitung} sebesar

$-5,108 > t_{\text{tabel}}$ sebesar 1,991 maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Artinya dari hasil tersebut dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah masih mengandalkan transfer dari pemerintah pusat sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah. Arah koefisien dana alokasi umum yang negatif berarti ketika dana alokasi umum meningkat maka kemandirian keuangan daerah akan menurun, apabila terjadi penurunan terhadap dana alokasi umum maka kemandirian keuangan daerah akan meningkat. Dana alokasi umum merupakan salah satu jenis dari dana perimbangan yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah yang seharusnya hanya bersifat mendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semakin kecil dana alokasi umum dalam menopang pembiayaan daerah diharapkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemberian transfer pemerintah pusat akan semakin rendah sehingga kemandirian daerah akan terwujud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kustianingsih (2018) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Menentukan kebutuhan DAU suatu daerah di tentukan dengan menggunakan pendekatan fiskal. Jika suatu daerah kemampuan fiskalnya rendah maka akan mendapat dana bantuan dari pemerintah salah satunya DAU yang relative besar. Hubungan DAU dengan tingkat kemandirian keuangan daerah adalah berbanding terbalik, jika suatu daerah memiliki DAU yang tinggi maka tingkat kemandirian daerah tersebut dapat dikatakan rendah.

3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan hasil pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi belanja modal sebesar 0,108 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 dengan nilai t_{hitung} sebesar $-1,625 > t_{\text{table}}$ sebesar 1,989 maka H_0 diterima dan H_3 ditolak. Artinya dari hasil tersebut belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Meningkatnya porsi anggaran belanja modal tidak selamanya diiringi dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu daerah yang merupakan indikator kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut karena terdapat kecenderungan penyerapan dan realisasi anggaran belanja modal yang rendah, jauh dibawah porsi dana yang telah ditetapkan dalam APBD dan belanja modal yang terjadi masih kurang merata sehingga menyebabkan ketimpangan antar daerah. Fenomena tersebut disinyalir akan menghambat pembangunan infrastruktur yang akan mengakselerasi kegiatan perekonomian yang kemudian berpengaruh terhadap penerimaan PAD yang diakibatkan oleh rendahnya serapan anggaran belanja modal pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dina (2018) yang menyatakan belanja modal tidak memberikan pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Alokasi anggaran belanja modal yang tidak tepat sasaran adalah salah satu faktor penyebab daerah kurang produktif dalam penyaluran dananya. Dana yang dikeluarkan tidak menambah kekayaan tetapi justru menjadi beban DAU. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan tidak bergantung pada pemerintah pusat dengan cara memaksimalkan sumber- sumber pendapatannya.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Bersumber dari data sekunder berdasarkan

Laporan Realisasi APBD pada wilayah pusat atau kota Provinsi Jawa dari periode 2017 hingga 2019. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil riset menampilkan bahwa variabel pendapatan daerah, dana alokasi umum, serta belanja modal berhubungan secara bersamaan mampu menjelaskan tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah.

2. Pendapatan asli daerah signifikan dan berpengaruh secara positif pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Sehingga semakin besar pendapatan asli daerah, maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Karena jika PAD yang dihasilkan tinggi maka daerah tersebut dapat membiayai kebutuhannya sendiri sehingga akan mengurangi dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

3. Dana alokasi umum berhubungan signifikan negatif pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya semakin besar dana alokasi umum yang dibagikan pemerintah kepada salah satu daerah maka semakin kecil pula tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut.

4. Belanja modal tidak memiliki hubungan dari tingkat kemandirian keuangan daerah. Alokasi anggaran belanja modal yang tidak tepat sasaran adalah salah satu faktor penyebab daerah kurang produktif dalam penyaluran dananya. Dana yang dikeluarkan tidak menambah kekayaan tetapi justru menjadi beban DAU.

6. REFERENSI

- Abdullah., Dwi Asmawanti, dan F. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Ilmiah*, 41(3), 68–70.
- Amalia N, Afifah Fauziah dan Haryanto (2017) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Ariani, Kurnia Rina. 2010. "Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tax Effort (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)". Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Ayu, A. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung (2013-2016). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Darwis, E. T. R. (2015). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- Haryanto, A. F. A. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13.
- <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
ISSN : 2460-0585, 7.
- Kustianingsih, N., Muslimin, M., & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6), 82–91.
- Mardawani, M. pd. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis*.